

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Disusun Oleh:

FITRI SETYA DEWANSARI
2008310315

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

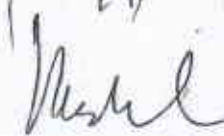
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Fitri Setya Dewansari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 April 1990
N.I.M : 2008310315
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Surabaya
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

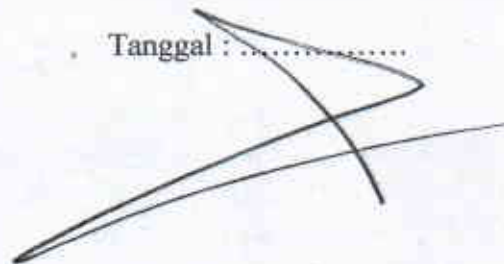
Tanggal : 6/4/12



(Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak., M.Si.)

Ketua Program Studi Akuntansi

Tanggal :



(Supriyati, SE., M.Si., AK.)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Fitri Setya Dewansari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 30 April 1990
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tenggilis Mulya 23H, Surabaya

PENDIDIKAN FORMAL

1996 – 2002 : SDN Kendangsari V, Surabaya
2002 – 2005 : SMP Negeri 17, Surabaya
2005 – 2008 : SMA 17 Agustus 1945, Surabaya
2008 – Sekarang : S1 Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota dari UKM Bola Basket STIE Perbanas Surabaya

Surabaya, 1 November 2012

(Fitri Setya Dewansari)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

Fitri Setya Dewansari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

fitrisetyad@gmail.com

Before regional autonomy policy, local government finances are still very dependent of the central government. Regional autonomy require areas to manage and develop the potential of the region to finance development. Hopes in the future dependence has been reduced.

The purpose of this research is analyzing financial performance local government before and after regional autonomy. This study is located in the city of Surabaya. The data used, financial data in the city of Surabaya 1996 until 2003. Descriptive research method used, using several financial ratios.

The results showed that the government city Surabaya before regional autonomy and after regional autonomy is decreasing. A factor causing the decrease is revenue especially taxes and retribution.

Key word : Regional Autonomy, The Regional Finance, Financial Performance

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Adapun kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat adalah urusan tentang politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Selain enam urusan kewenangan tersebut, maka menjadi kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Untuk merealisasikan keinginan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat, maka melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai dengan UU No. 24 Tahun 2005, Pemerintahan Republik Indonesia secara resmi memberlakukan status otonomi daerah kepada daerah otonom dan mencabut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik untuk mendorong pembangunan daerah, menggantikan sistem sentralisasi kewenangan yang dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan

di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah (www.ekonomirakyat.org).

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti mengambil objek penelitian terhadap laporan keuangan pada Pemerintahan Daerah Surabaya sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah, maka peneliti ingin mengetahui kondisi keuangan pemerintahan daerah tersebut yaitu ingin dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, tingkat *Debt Service Coverage Ratio* yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membayar kembali pinjaman daerah, tingkat keserasian yaitu menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, tingkat pertumbuhan yaitu menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode lainnya.

Dari laporan keuangan (berupa Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran) dapat dilakukan analisis dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Dari hasil analisis dapat diketahui kinerja pemerintahan daerah dan hasil analisis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemerintahan daerah. Menilai kondisi keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai media evaluasi kinerja keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan dapat menggunakan berbagai rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt*

Service Coverage Ratio (DSCR), Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

RERANGKA TEORITIS

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 membahas tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 membahas tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara membahas tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa indikator kerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan ini menyatakan standar-standar yang harus dipenuhi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 membahas mengenai Dana Perimbangan, dimana terdapat hubungan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terdapat unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 membahas tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menjadi pedoman umum untuk Pemerintah pusat dalam Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kandungan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan laporan Kinerja.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada Pasal 1, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, kinerja keuangan daerah merupakan pengikhtisaran indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) Kinerja keuangan daerah merupakan kinerja keuangan yang tercermin dari enam rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan

daerah, *debt service coverage ratio*, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut *American Accounting Association* Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – pemda (kabupaten, kota atau provinsi) (Abdul Halim 2007:32).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar akuntansi pemerintah No. 1. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. (Wuryan Andayani 2007 ; 135)

Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD.
2. Dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. (Mahmudi 2007;2).

Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Lampiran : Laporan Keuangan BUMD

Dari kelima jenis laporan tersebut, biasanya yang dipublikasikan hanya tiga laporan utama saja, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas (Mahmudi 2007:61).

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan menyediakan informasi-informasi yang diperlukan (Wuryan Andayani 2007 ; 136).

Kebutuhan Informasi Keuangan Daerah

Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tersebut antara lain :

- a. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan.
- c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat resiko berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.

- d. DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.
- e. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja.

Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Manfaat laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya,
 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi,
 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor keinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
- Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.

APBN dan APBD

APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan negara merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Definisi anggaran menurut *The National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, anggaran merupakan

rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim 2012 ; 15).

Analisis Rasio Keuangan pada Pemerintahan Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia (Abdul Halim 2012 ; 232).

Analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rumus yang digunakan :

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. Rasio ini untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah.

Rumus yang digunakan :

$$\frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Belanja Pembangunan}}$$

Keterangan :

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian daerah (dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Sumber Daya Alam, dan Bagian Daerah Lainnya)

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Biaya Wajib

Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5.

Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup menutup seluruh beban hutang berupa angsuran pokok dan bunga.

3. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana alokasi yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}$$

$$\frac{\text{Total APBD}}{\text{Belanja Pembangunan}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rumus yang digunakan:

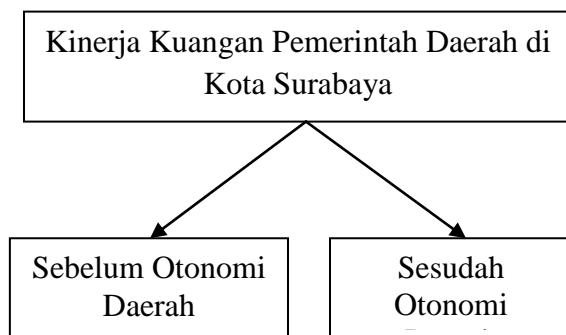
$$\frac{P_n - P_o}{P_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun yang dihitung

P_o = Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Surabaya sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dalam penelitian

ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang akan dilakukan berdasarkan analisis pada analisis variabel-variabel yang nantinya akan dijelaskan dan dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio untuk menganalisis data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus.

Sumber data berasal dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran akan dibandingkan antara sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah, mulai dari tahun 1996 sampai dengan 2003. Sumber data berasal dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran akan dibandingkan antara sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah, mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2003.

Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, lebih lanjut dilakukan pembatasan agar pembahasan lebih berfokus. Pertama, penelitian menggunakan pada Pemerintahan Daerah yang berada di Surabaya. Kedua, data analisis menggunakan laporan keuangan berupa Realisasi Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran untuk tahun 1996 sampai dengan 2003. Ketiga, analisis kinerja keuangan menggunakan enam jenis data rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kota Surabaya yang mencakup beberapa rasio menurut Abdul Halim (2012), yaitu :

1. Kemandirian Keuangan Daerah
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala *numeric* (angka). Sedangkan jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari Pemda yang dijadikan sampel dalam penelitian yang diperoleh dari Pemerintahan Daerah kota Surabaya. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian data-data tersebut diolah guna mencari hasil dari penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah berupa Laporan Keuangan Daerah (berupa Realisasi Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran) Kota Surabaya tahun 1996 sampai dengan 2003.

Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berkaitan dengan indikator kinerja keuangan pemerintahan daerah.
2. Melakukan analisis data dengan menggunakan alat hitung Ms Excel
3. Memperbandingkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan pemerintah daerah antara satu periode dengan periode lainnya.

4. Mengetahui hasil masing-masing rasio
5. Menginterpretasikan perhitungan hasil rasio dalam aspek keuangan pemerintahan.
6. Membandingkan hasil rasio-rasio tersebut antara sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Metode analisis yang berdasarkan pada analisis variabel-variabel yang nantinya akan mendukung dari analisis tersebut. Dapat diukur dengan nyata, namun analisisnya bersifat menjelaskan atau menguraikan dengan bentuk kalimat-kalimat.

Analisis Deskriptif

Metode analisis yang berdasarkan pada analisis variabel-variabel yang nantinya akan mendukung dari analisis tersebut. Dapat diukur dengan nyata, namun analisisnya bersifat menjelaskan atau menguraikan dengan bentuk kalimat-kalimat.

Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif ini berdasarkan pada analisis variabel-variabel yang nantinya akan dijelaskan dan dapat dihitung dengan menggunakan alat ukur yang pasti.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio untuk menganalisis data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus (Abdul Halim, 2012).

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1
Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 1996 – 2003
(dalam 000 Rupiah)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah					
Tahun	Keterangan	PAD	BP	PAD/BP	Rata-rata
1996	Sebelum Otonomi Daerah	104.614.150	180.463.385	57,96973	53,34584%
1997		118.972.597	218.549.707	54,43731	
1998		142.440.417	241.422.025	59,00058	
1999		119.747.646	260.458.183	45,97576	
2000	Sesudah Otonomi Daerah	138.684.846	265.384.885	52,25800	36,58518%
2001		131.115.000	329.845.890	39,75038	
2002		208.238.135	757.849.497	27,47750	
2003		226.773.205	844.440.570	26,85484	

Sumber: *Surabaya dalam Angka*, BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada saat sebelum otonomi daerah menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun (1996-1999) mengalami fluktuasi atau naik turunnya dengan rata-rata fluktuasi sebesar 5,5%. Faktor yang menyebabkan adanya fluktuasi adalah naik turunnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemda yang turun hingga 15 % (contoh pada tahun 1998-1999) yang pada tahun 1998, Rp 142.440.417.000 turun menjadi Rp 119.747.646.000 pada tahun 1999. Komponen tersebut mengalami fluktuasi sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan sesudah otonomi daerah

menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun (2000-2003) mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 6,5%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada pendapatan asli daerah yang turun sampai 5% (contoh pada tahun 2000-20001) yang pada tahun 2000 sebesar Rp 138.684.846.000 turun menjadi Rp 131.115.000.000 pada tahun 2001.

Dari hasil yang diperoleh bahwa kemandirian sebelum otonomi daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap bantuan ekstern lebih rendah dibandingkan dengan sesudah otonomi daerah.

b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Tabel 4.2
Prosentase Rasio Debt Service Coverage Ratio
Tahun 1996 – 2003
(dalam 000 Rupiah)

Debt Service Coverage Ratio							
Tahun	Ket.	PAD	BD	DAU	BW	BPpbg	Hasil
1996	Sebelum Otonomi Daerah	104.614.150	32.829.424	38.319.128	92.216.457	93.195.151	0,89646
1997		118.972.597	46.428.540	45.941.458	114.475.060	117.077.271	0,82738
1998		142.440.417	46.511.815	69.266.913	123.839.238	121.713.659	1,10406
1999		119.747.646	72.035.229	92.780.640	197.868.454	124.790.464	0,69472
2000	Sesudah Otonomi Daerah	138.684.846	84.857.145	125.530.129	260.013.774	102.926.334	0,86526
2001		131.115.000	90.197.124	127.137.262	255.332.656	125.804.371	0,74017
2002		208.238.135	178.705.012	331.374.604	545.924.044	81.563.010	2,11362
2003		226.773.205	181.416.211	332.084.546	719.687.387	212.107.093	0,97057

Sumber: *Surabaya dalam Angka*, BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada saat sebelum otonomi daerah dari tahun ke tahun (1996-1999) mengalami fluktuasi dengan rata-rata fluktuasi sebesar 0,19%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada pendapatan asli daerah yang turun hingga 15% (contoh pada tahun 1998-1999) yang pada tahun 1998, Rp 142.440.417.000 turun menjadi Rp 119.747.646.000 pada tahun 1999. Sehingga dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sedangkan pada saat sesudah otonomi daerah juga menunjukkan fluktuasi, dengan rata-rata fluktuasi sebesar

0,66%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada pendapatan asli daerah yang turun sampai 5% (contoh pada tahun 2000-2001) yang pada tahun 2000 sebesar Rp 138.684.846.000 turun menjadi Rp 131.115.000.000 pada tahun 2001. Sehingga dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi yang signifikan.

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah sama-sama tidak mendapatkan pinjaman dikarenakan dalam setiap tahunnya DSCR yang diperoleh memiliki angka dibawah 2,5.

c. Rasio Keserasian

Tabel 4.3
Prosentase Rasio Keserasian
Tahun 1996 – 2003
(dalam 000 Rupiah)

Tahun	Keterangan	TBR/TB (%)	Rata-rata (%)	TBP/TB (%)	Rata-rata (%)
1996	Sebelum Otonomi Daerah	49,73607	52,73282	50,26392	47,26716
1997		49,43809		50,56190	
1998		50,43281		49,56718	
1999		61,32434		38,67565	
2000	Sesudah Otonomi Daerah	71,64095	75,71796	28,35904	24,28208
2001		66,99235		33,00764	
2002		87,00164		12,99835	
2003		77,23692		22,76329	

Sumber: *Surabaya dalam Angka*, BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.3 bahwa dapat dilihat bahwa (pada belanja rutin) pada saat sebelum otonomi daerah dari tahun ke tahun (1996-1999) mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 3,5%. Sedangkan pada belanja pembangunan sebesar 8,7%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada perbandingan antara belanja rutin maupun pembangunan dengan total APBD yang relative besar dari tahun ke tahunnya, sehingga hasil dari perhitungan menunjukkan hasil yang fluktuasi. Sedangkan pada saat sesudah otonomi daerah (2000-2003) juga menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 12,2%, sedangkan pada belanja pembangunan sebesar 8,7%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada belanja rutin dan pembangunan.

Belanja rutin yang turun hingga 2% (contoh pada tahun 2000-2001) yang pada tahun 2000 belanja rutin sebesar Rp 260.013.774.000,- turun menjadi Rp 255.332.656.000,- pada tahun 2001. Belanja pembangunan yang turun hingga 35% (contoh pada tahun 2001-2002) yang pada tahun 2001 belanja pembangunan sebesar Rp 125.804.371.000,- turun menjadi Rp 81.563.010.00,- pada tahun 2002, sehingga hasil dari perhitungan menunjukkan hasil fluktuasi.

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah otonomi daerah, belanja rutin mempunyai bagian yang lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan, sehingga

rasio belanja pembangunan terhadap APBD
masih relatif kecil.

d. Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.4
Prosentase Rasio Pertumbuhan
Tahun 1996 – 2003

Rata-rata (%) Rasio Pertumbuhan ($P_n - P_0 / P_n * 100\%$)					
Tahun	Keterangan	PAD	TPD	BR	BP
1996 1997 1998 1999	Sebelum Otonomi Daerah	11,03328	21,68002	27,62678	13,71639
2000 2001 2002 2003	Sesudah Otonomi Daerah	19,51945	32,00324	48,8113	32,39829

Sumber: *Surabaya dalam Angka*, BPS Jawa Timur (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.4 bahwa dapat dilihat pada saat sebelum otonomi daerah pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 13,6%, pada Total Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 7,5%, pada Belanja Rutin mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 15,5%, dan pada Belanja Pembangunan juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 6,5%. Faktor yang menyebabkan fluktuasi adalah pada data realisasi APBD yang diperoleh dari tahun yang dihitung maupun tahun sebelumnya, sehingga hasil dari perhitungan menunjukkan fluktuasi. Sedangkan pada saat sesudah otonomi daerah pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 33,8%, pada Total Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 33,7%, pada Belanja Rutin mengalami fluktuasi dengan rata-rata

sebesar 5,7%, pada Belanja Pembangunan mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 55,8%. Faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi adalah pada data realisasi APBD yang diperoleh dari tahun yang dihitung maupun tahun sebelumnya, sehingga hasil dari perhitungan menunjukkan fluktuasi.

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah komponen sumber pendapatan dan pengeluaran khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (sumber pendapatan) dan Belanja Pembangunan (pengeluaran).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Surabaya

sebelum dan sesudah otonomi daerah. Data yang digunakan adalah Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kota Surabaya dari tahun 1996 sampai dengan 2003. Analisis kinerja yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, DSCR, Keserasian dan Pertumbuhan pada pemerintah daerah kota Surabaya. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1996 sampai dengan 1999 (sebelum otonomi daerah) menunjukkan rata-rata yang lebih besar dibandingkan pada tahun 2000 sampai dengan 2003 (sesudah otonomi daerah), dengan demikian kemandirian keuangan daerah pada tahun 1996 sampai dengan 1999 tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan provinsi) relatif rendah dibandingkan pada tahun 2000-2003 (sesudah otonomi daerah).
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1996 sampai dengan 1999 (sebelum otonomi daerah) dan pada tahun 2000-2003 (sesudah otonomi daerah) menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun tersebut tidak ada yang mendapatkan pinjaman dikarenakan angka yang dihasilkan dalam setiap tahunnya dibawah 2,5.
3. Rasio keserasian pada Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1996-1999 (sebelum otonomi daerah) terhadap Belanja Rutin mempunyai rata-rata yang lebih besar dibandingkan belanja pembangunan, sehingga pada saat sebelum otonomi daerah sebagian dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin. Pada tahun 2000-2003 (sesudah otonomi daerah) terhadap belanja rutin mempunyai rata-rata yang lebih besar dibandingkan belanja pembangunan, sehingga pada

saar sebelum otonomi daerah sebagian dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil.

4. Rasio pertumbuhan pada Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 1996-1999 (sebelum otonomi daerah) terhadap pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan rata-rata yang dimiliki relatif lebih kecil dibandingkan pada tahun 2000-2003 (sesudah otonomi daerah). Sehingga pertumbuhan pada pemerintah kota Surabaya sebelum otonomi daerah lebih rendah dibandingkan pada sesudah otonomi daerah, serta komponen pendapatan dan pengeluarannya lebih diperhatikan kembali.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini setelah melakukan pengujian, yaitu :

1. Periode penelitian yang digunakan masih terbatas selama empat tahun sebelum otonomi daerah dan empat tahun sesudah otonomi daerah, karena penulis mengalami keterbatasan data penelitian.
2. Rasio-rasio yang digunakan hanya mengacu pada referensi Abdul Halim saja.

Saran

Dengan pertimbangan keterbatasan yang dimiliki, maka dapat diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat digali.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap agar dapat meneliti lebih lengkap lagi mengenai unsur-unsur perkembangan dalam APBD, sehingga

nantinya akan memperoleh hasil analisis yang lebih lengkap dan kompleks lagi dengan menggunakan alat analisis yang lengkap dan menambahkan obyek dalam penelitian sehingga tidak pada satu kota saja.

3. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar dapat meneliti lebih lengkap tentang subyek yang akan diteliti.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap rasio yang digunakan lebih lengkap, misalkan pada Rasio Efektivitas dan Efisiensi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, Muh. Syam Kusufi.2012. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Edisi ke-4. Jakarta. Salemba Empat.
- Erna Kurniawati.2009. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Studi Kasus Pada PDAM di Kota Sorong)". Analisis Vol. 6 No. 2: 112-122 (http://pasca.unhas.ac.id/jurnal_pdf/an_6_2/an_6_2_2.pdf, 12April 2012).
- Fitriana Dwi.2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan", Skripsi Sarjana tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Gideon Tri Budi, et al. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Otonomi (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)". Pascasarjana UPNV Jatim.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardismo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Paidi Hidayat, et al. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 14, No. 3 (<http://journal.uui.ac.id>, 19 Februari 2012).
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah <http://www.kpu.go.id>
- _____, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <http://www.djlpe.esdm.go.id>
- _____, Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara. <http://www.esdm.go.id>
- _____, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://sipkd.jakarta.go.id>
- _____,Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. <http://www.presidentri.go.id>
- _____,Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.presidentri.go.id>
- _____, Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. <http://www.presidentri.go.id>
- Sofyan Syafri Harahap. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi-9. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- .Wuryan Andayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang. Bayumedia Publishing. <http://www.ekonomirakyat.org/> Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. <http://palembang.bpk.go.id> Laporan Keuangan Komparatif Prabumulih-Palembang. <http://dewandaerah.wordpress.com> Pemberlakuan Otonomi Daerah.